

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
AGAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK, KARTU KELUARGA dan AKTA CATATAN SIPIL
(Studi Implementasi pada Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

SYAIFUL HAMID
BP. 05 193 028



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009



ABSTRAK

Syaiful Hamid (05 193 028). Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pembimbing I Drs. Yoserizal M.Si dan Pembimbing II Desna Aromatica S.AP M.AP. Judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Catatan Sipil (Studi Implementasi Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP Gratis) di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam).

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menertibkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program KTP gratis dan kendala dalam implementasi program KTP gratis di Kecamatan Sungai Pua. Dalam penelitian menggunakan beberapa konsep tentang implementasi kebijakan yang mengadopsi teori yang dikemukakan George Edward III, dan konsep tentang pelayanan publik. Dengan mengacu kepada teori tersebut maka akan dapat diketahui bagaimana kendala dan implementasi kebijakan KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap berbagai informan yang terlibat langsung terhadap pelaksanaan program KTP gratis. Dalam melengkapi data guna menjawab pertanyaan penelitian, juga disertakan dengan observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTP gratis di Kecamatan Sungai Pua belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi antara aparat pemerintahan dengan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pengurusan KTP, sumber daya aparat pelaksana yang masih kurang, dan faktor insentif yang kecil yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada. Oleh karena itu perlu adanya dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP melalui sosialisasi secara berkelanjutan, menyediakan petugas khusus untuk menangani KTP dan merumuskan kebijakan baru yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim monopolistik-sentralistik Orde Baru, Indonesia memasuki suatu fase baru dalam kehidupan kenegaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan reformasi 1998 cukup berhasil mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis, transparan, dan adil, meskipun masih terdapat berbagai titik lemah. Pemerintah dituntut untuk semakin proaktif mengupayakan kesejahteraan warganya dan membuka saluran-saluran politik alternatif dengan memberikan kebebasan yang besar dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Reformasi politik sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa diiringi dengan reformasi administrasi atau birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah mulai mencoba melakukan pembenahan di bidang administrasi publik sehingga reformasi politik yang sedang dilakukan berada dalam kondisi yang *compatible* (harmonis) dengan reformasi pelayanan publik. Sejak pemerintahan peralihan (Habibie) hingga pada masa pemerintahan SBY-JK agenda reformasi birokrasi menjadi program yang tidak terpisahkan dari pemerintahan setiap kepala negara.¹ Namun, reformasi yang dilakukan masih bersifat parsial (sebahagian/setengah-

¹ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden; B. J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 15

setengah) dan tambal sulam, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi publik di Indonesia.

Kinerja birokrasi pelayanan publik dewasa ini semakin mendapat sorotan dari masyarakat. Aparat birokrasi sering dihujat oleh masyarakat karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Birokrasi Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, prosedur administrasi yang semakin berbelit-belit, banyak aturan formal yang tidak ditaati dan berlangsungnya praktik mal administrasi.² Akibatnya muncul *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi) dalam memperoleh pelayanan publik karena masyarakat pengguna jasa harus mengalokasikan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih dari prosedur yang seharusnya.³

Dalam spektrum yang lebih luas, salah satu sumber penyebab timbulnya *high cost economy* di Indonesia adalah masih bercokolnya *kartel*, *monopoli*, *favoritism*, *praktik standar ganda* dan masih merajalelanya berbagai bentuk pungutan, mulai dari yang setengah resmi hingga yang tidak resmi yang menyertai pemberian pelayanan publik oleh dinas-dinas pemerintah. Dalam rangka mengatasi berbagai penyakit birokrasi (*bureau pathology*) dan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mulai mendispersikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.⁴

² Muhajir Darwin, "Potensi dan Kendala Aparatur Pemerintah sebagai Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua", Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalies Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Maret 1993, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm.4

³ Solichin Abdul Wahab, "Globalisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Governance", Jurnal Administrasi Negara, Volume II, No. 1 September 2001, hlm.51

⁴ *Ibid*

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

6.1.1 Implementasi KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Berkaitan dengan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, Pemkab Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 2 tahun 2006 tentang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. Tujuan dikeluarkannya Perda ini adalah untuk meningkatkan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pencatatan dan pendataan kependudukan.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Implementasi Program KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena faktor komunikasi antara aparat pemerintahan dengan masyarakat (dalam bentuk sosialisasi) yang masih belum sepenuhnya baik dimana masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui

prosedur pengurusan KTP, sumber daya aparat pelaksana yang masih kurang sehingga dalam melayani belum sepenuhnya baik, faktor insentif yang kecil yang diterima petugas menimbulkan semacam rasa terpaksa dalam melaksanakan pekerjaan karena beban tugas yang terlalu banyak.

6.1.2 Kendala Implementasi KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua

Sedangkan terkait dengan kendala dalam implementasi program KTP Gratis di Kecamatan Sungai Pua diantaranya yaitu sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sumber daya aparat yang sedikit, peralatan yang seadanya dan perubahan struktur organisasi serta pelaksanaan standar pelayanan prima yang belum berjalan baik.

6.2 SARAN

1. Sasaran terpenting dari Program KTP Gratis adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki KTP dan meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat menyangkut bidang pencatatan administrasi kependudukan. Rekomendasi yang disarankan adalah agar pihak Kecamatan Sungai Pua lebih aktif lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP dengan cara melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dengan optimalisasi peran dan fungsi dari Pemerintah Nagari dan Jorong yang terkait.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk bisa menyediakan tenaga khusus untuk menangani KTP agar tidak lagi terjadi adanya beban tugas yang menumpuk pada satu orang aparat sebagai akibat adanya rangkap jabatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Alrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Pemulisan Laporan*, Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Chalid, Pheni. 2005. " *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*", Jakarta: Kemitraan.
- Darwin, Muhajir. 1993, "Potensi dan Kendala Aparatur Pemerintah sebagai Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua", Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalies Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Maret 1993, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Gibson, James L. dkk. 1997. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta : Erlangga
- Hidayat, L. Misbah 2007. *Reformasi Administrasi; Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden; B. J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1985. *Metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta: PT. Gramedia.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan
- Lukman, Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press